

**BAB III**

**EKONOMI SEBAGAI JALAN PEMBUKA KETERLIBATAN CHINA**

**DALAM PERDAMAIAN UWSA DI MYANMAR**

Perdamaian etnis telah lama diusung oleh pemerintah Myanmar, bahkan semenjak awal negara tersebut meraih kemerdekaannya. Usaha perdamaian mengalami masa pasang surut. Adakalanya beberapa etnis berhasil patuh dan melakukan gencatan senjata karena terikat perjanjian dengan pemerintah Myanmar, namun ada pula kalanya etnis-etnis menolak untuk patuh dan berusaha untuk meraih kepentingannya baik itu memisahkan diri dari Myanmar atau meraih otonomi penuh. Upaya perdamaian atau rekonsiliasi tersebut mendapat dukungan dari banyak pihak, terutama di dunia Internasional. Terdapat banyak aktor yang tergabung didalam usaha Myanmar menciptakan perdamaian internalnya, salah satunya adalah China. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar, tentu China sewajarnya berperan aktif di dalam usaha perdamaian ini, terlebih konflik etnis Myanmar telah menyebabkan membanjirnya gelombang pengungsi ke dataran China. Namun, keterlibatan China ini memicu banyak pertanyaan dan dugaan, baik itu terkait kepentingannya atau faktor kedekatan dengan etnis-etnis partisipan di Myanmar. Di dalam bab ini China akan dianalisa lebih lanjut terkait faktor-faktor yang membuatnya memilih ikut dalam usaha perdamaian di Myanmar tersebut dan bagaimana China dapat berperan dalam usaha perdamaian di Myanmar ini.

## **A. Hubungan China dan Myanmar**

China merupakan negara yang telah menjalin hubungan cukup lama dengan Myanmar. Bahkan hubungan tersebut dimulai sejak Myanmar berada di awal kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950. Melalui pendirian hubungan diplomatik pada 8 Juni 1950, Myanmar menjadi negara non-sosialis pertama yang mengakui keberadaan People's Republic of China (Hongwei, 2008). Hubungan kedua negara tersebut pada awalnya memang berjalan cukup renggang karena Myanmar masih memiliki begitu banyak hal yang harus disiapkan sebagai negara baru. Namun ditahun-tahun berikutnya, secara bertahap hubungan China dan Myanmar berkembang menjadi lebih erat dan komprehensif di berbagai aspek. Perwakilan tiap negara saling mengunjungi satu sama lain sejak tahun 1950 untuk membahas permasalahan-permasalahan bilateral.

Istilah Pauk-Phaw bahkan muncul pada era 1950-an yang menjadi sebuah gambaran atau icon untuk hubungan China dan Myanmar. Pauk-Phaw diartikan sebagai hubungan yang erat dan bersahabat, dimana mencirikan pesatnya perluasan hubungan antara China dan Myanmar (Lintner, 2017). Hubungan Pauk-Phaw ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pencapaian-pencapaian baru dibidang kerjasama antar kedua negara. Seperti di tahun 1954, perjanjian dagang pertama antara China dan Myanmar diratifikasi dan menyusul setelahnya, pada tahun 1960, perbincangan terkait perbatasan pun dilakukan. Pemerintahan Myanmar saat itu, dipimpin oleh Jenderal Ne Win melalui *the State Law and Order Restoration Council* (SLORC), telah merubah Myanmar, membebaskan dari netralisme dan sosialisme, yang membuat China memiliki kesempatan untuk penetrasi politik dan

ekonomi (Seth, 1996 dalam Roy, 1998). Kerjasama China-Myanmar pun semakin meluas, kerusuhan yang terjadi di Myanmar rupanya tidak menghalangi China untuk terus menjalin kerjasama yang menguntungkan. Bahkan, pada tahun 1988, pasca kerusuhan militer di Myanmar terjadi, Myanmar secara tegas menjalin kerjasama militer yang lebih dekat dengan China. Kerjasama militer tersebut membuat China setuju untuk memfasilitasi pelatihan bagi tentara angkatan udara, laut dan darat Myanmar. Sebanyak 300 tentara angkatan udara dan laut Myanmar ditempatkan di perguruan tinggi China, pinjaman gratis serta kredit pun ditawarkan oleh China untuk perdagangan senjata ke Myanmar (Shee, 2002). China pun mentransfer berbagai persenjataanya seperti *small arms*, pesawat tempur, tank dan kapal patroli (Roy, 1998). Nilai total yang dikeluarkan China untuk persenjataan Myanmar saat itu mencapai 1,4 juta dollar, terhitung hingga tahun 1994 (Hollingsworth, 1994 dalam Roy, 1998).

Kerjasama Pauk-Phaw yang dimulai sejak era junta militer pun nampaknya tidak tergoyahkan, bahkan dengan pergantian politik dan kekuasaan di Myanmar. Walaupun demokrasi hadir menjadi warna baru di pemerintahan Myanmar, hubungan antara China dan Myanmar tetap terjaga. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan bersama mengenai kemitraan strategis yang komprehensif pada 2 Mei, 2011 (Bi, 2014). Bahkan China dan Myanmar juga memperkuat kembali kerjasama dibidang ekonomi, agrikultur, lingkungan, budaya, wisata, kehutanan, pendidikan, saintifik dan perlawanan terhadap narkoba. Namun, perbedaan corak kerjasama rupanya dirasakan oleh para pengamat politik beserta media. Media terutama sering menjadikan isu ini dengan mengagungkan kembali hubungan

China-Myanmar di era junta militer dan membandingkannya dengan hubungan yang saat ini terjalin. Salah satu isu ini sempat membuat hubungan antara China dan Myanmar berselisih paham adalah dikala terdapat penolakan atas pembangunan proyek China di Myanmar.

Proyek bendungan Myitsone adalah salah satu proyek yang dilakukan China pada tahun 2011, namun Presiden Myanmar Thein Shein memutuskan menunda proses pembangunan bendungan tersebut. Media mengangkat isu ini dengan mengkaitkannya sebagai akibat dari demokratisasi di Myanmar. Keberadaan demokrasi di Myanmar tentu membuat banyak perubahan dibanding era junta militer, dimana salah satunya adalah kebebasan untuk berpendapat. Demokrasi membuat semua opini rakyat yang awalnya terabaikan menjadi didengar. Masyarakat Myanmar pada tahun 2011 tersebut telah mengungkapkan pembangunan bendungan itu sangat merugikan, dan oleh sebab itu Presiden Thein Shein mengeluarkan kebijakan untuk menunda pembangunannya (Bi, 2014). Isu-isu perubahan pola hubungan politik semacam ini membuat terciptanya pandangan dikalangan masyarakat bahwa hubungan China dan Myanmar tidak lagi bersifat Pauk-Phaw. Tetapi faktanya, demokrasi secara tegas dibantah China jika sebagai hambatan atas adanya kerjasama bilateral dengan Myanmar. Demokrasi, keterbukaan dan kestabilan Myanmar lebih memberikan manfaat bagi China, dibuktikan dengan lebih banyaknya interaksi pasca pemerintahan baru (Bi, 2014 : 176).

Kini, China bukan hanya investor terbesar dan mitra dagang kedua terbesar bagi Myanmar. Tetapi juga kontraktor teknik, kreditur dan penyumbang terbesar

(Bi, 2014: 180-181). Kedudukan China tersebut menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Thailand. Hubungan ekonomi yang terjalin sukses ini berhasil bertahan lama karena adanya ketergantungan satu sama lain. Barang-barang yang diimpor dari China cenderung harganya lebih murah jika dibandingkan dengan barang produksi domestik atau negara lain. Dengan daya beli masyarakat yang rendah, produk China tersebut menarik banyak peminat. Selain itu, China menjadi sumber pendanaan yang tepat bagi Myanmar, karena walau Myanmar terus saja mengalami defisit di bagian ekspor ke China, bantuan dibidang pembayaran dan lain sebagainya tetap mengalir deras. Myanmar pun merespon hal tersebut dengan meneratkan hubungannya dengan China. Salah satunya adalah dengan mempermudah lalulintas ekonomi, Myanmar membuka 4 gerbang dagang yakni Muse, Leweje, Chinshwehaw dan Kambalti (Bi, 2014).

## **B. Hubungan China dan Etnis Wa (UWSA) di Myanmar**

Dibalik kedekatan China dengan Myanmar melalui berbagai perjanjian atau kesepakatan, China cukup menimbulkan banyak praduga terkait hubungannya dengan salah satu kelompok etnis pemberontak di Myanmar yakni *United Wa State Army*. Bila ditelusuri jauh sejak masa kejayaan komunis, China memiliki hubungan erat dengan beberapa etnis di Myanmar termasuk UWSA. Hubungan ini dimulai bersamaan dengan berakhirnya perang sipil di China<sup>1</sup>, dimana Kuomintang banyak yang melarikan diri ke dalam kawasan utara Burma (nama lama Myanmar).

---

<sup>1</sup> Perang Sipil di China saat itu adalah perang 23 tahun antara Chinese Communist Party (CCP) dan Nationalist Kuomintang (KMT) yang berakhir dengan menyingkirnya Kuomintang karena kalah ke wilayah-wilayah di sekitar dataran China

Keberadaan Kuomintang di kawasan Myanmar tersebut memicu protes dari masyarakat Burma dan terjadilah konflik bersenjata yang berakhir dengan resolusi UN untuk memindahkan Kuomintang ke Taiwan yang masih merupakan wilayah dari China.

Awal kehidupan Myanmar tidak terlepas dari konflik pemberontakan etnis. Comunist Party of Burma (CPB) adalah kekuatan yang terbesar dan beraliran sama dengan CCP di China. Tetapi, walaupun CPB memiliki kecenderungan aliran Maoist yang kuat, China berupaya untuk tidak mendukung eksistensinya (Lintner, 2017). China terus menjalin kerjasama dengan pemerintah Myanmar dan membatasi diri dengan keberadaan CPB di Myanmar. Namun, pada tahun 1950an, beberapa kelompok CPB datang ke China untuk meminta bantuan persenjataan pemberontakan di Burma. Mereka adalah kelompok yang terbuang akibat desakan dari pemerintah Myanmar saat itu, U Nu. Selama U Nu memegang kekuasaan di Myanmar, mereka tinggal di Sichuan China, menghadiri sekolah komunis China tetapi bersikap tertutup dengan tanpa menerima bantuan dalam bentuk apapun. Hal ini membuat hubungan China dan Myanmar sempat memburuk karena China seakan memberi bantuan terhadap CPB yang merupakan kelompok insurgensi Myanmar.

Semenjak mengasingkan diri ke dataran China, jalur komunikasi CPB pun terputus. Sehingga kelompok buangan CPB yang berada di China tidak bisa melakukan kontak dengan pusat di unubg Pegu Yama, Myanmar. Hingga pada akhirnya, sebuah akibat dari konflik militer di Myanmar menjadikan hubungan tersebut tersambung kembali dan sekaligus menjadi tanda akan adanya upaya

perjanjian damai untuk para etnis di Myanmar. Pada 14 Juli 1963, Jenderal Ne Win memanggil CPB, “red flag” communist party, Karen, Mon, Shan, Kachin dan etnis kecil lainnya untuk perjanjian damai di Rangoon Myanmar (Lintner, 2017). Namun perjanjian damai tersebut tidak kunjung menemui titik temu sehingga pada akhirnya, satu persatu etnis partisipan kembali ke wilayahnya masing-masing dan CPB kembali ke China.

Pada tahun yang sama, 1963, anggota CPB yang dikirim untuk belajar ke Uni Soviet kembali ke Beijing, China. Mereka kemudian membentuk sebuah kelompok yang nanti pada akhirnya akan menjadi tokoh-tokoh pemimpin dari CPB. Kelompok tersebut beranggotakan Khin Maung Gyi, San Thu dan Thein Aung. Thakin Ba Thein Tin pemimpin kelompok buangan CPB ditetapkan menjadi ketua kelompok tersebut. Dimasa-masa mereka menikmati pembelajaran China, pemerintah Myanmar menciptakan suatu kekacauan yang cukup besar. Kekacauan ini bermula dari adanya pembahasan perbatasan antara Myanmar dan China. Pemerintah Myanmar dalam pembahasan Namwan Assigned Tract mencoba melakukan barter wilayah yang meliputi 3 wilayah di negara bagian Kachin yakni Hpimaw, Gawlum dan Kangfang, beserta 2 wilayah di perbukitan etnis Wa yakni Panhung dan Panglao sebagai ganti klaim atas wilayah Namwan yang pada praktiknya telah berada dalam teritori Burma (Lintner, 2017).

Keputusan Myanmar ini memicu munculnya banyak protes dari masyarakat yang menyerukan anti China. Semua hal yang menggambarkan perwakilan dari China di Myanmar dihancurkan, seperti rumah masyarakat China, toko, tempat ibadah atau simbiol-simbol bahkan kedutaan besar. Kericuhan ini membuat

kelompok CPB terus bertambah dan membuat kelompok buangan CPB di China kembali ke Myanmar dengan bersenjata lengkap. Chinese Communist Party mendukung penuh kembalinya CPB ke Myanmar. Bahkan China menyediakan berbagai peralatan bersenjata untuk CPB seperti senapan serbu, senapan mesin, peluncur roket, senjata anti-pesawat terbang, peralatan radio, jip, truk dan bensin. China juga menyediakan persediaan lainnya seperti makanan dan peralatan untuk bertahan hidup. Di Myanmar, CPB bersatu utuh mencoba meredakan kericuhan, bersama dengan ribuan relawan China.

Di tahun-tahun berikutnya, CPB tetap menjadi ancaman besar bagi pemerintahan Myanmar. Bahkan Myanmar secara tegas memberikan sinyal pada China bahwa Myanmar tidak mengizinkan adanya bantuan terhadap kelompok pemberontak CPB bagaimanapun terbatasnya itu. Oleh karena itu, China menghentikan semua bantuannya dan mengharuskan CPB bersifat mandiri untuk memenuhi segala kebutuhannya. Hubungan antara China dan Myanmar membaik setelahnya, namun menandai dimulainya hubungan antara China dan UWSA. China memberlakukan kebijakan ganda untuk memanfaatkan ikatan sejarah dan budaya untuk keuntungan, dan melakukan pendekatan netral untuk siapapun pemegang kekuasaan di Myanmar. Pada waktu itu, sekitar 1357 mil perbatasan ada dibawah kekuasaan CPB yang memiliki hubungan kedekatan dengan China (Lintner, 2017).

Kejayaan CPB tidak berlangsung lama. Setelah sekitar 4 dekade, CPB mulai melangkah menuju akhir dari eksistensinya. Sejak tahun 1953, CPB menjadi partai yang diancam keberadaannya dan pada akhirnya bubar di tahun 1989 (Tha, 2013). Bubarnya CPB yang merupakan kelompok pemberontak terbesar ini tidak lantas



menghentikan gejolak konflik di Myanmar. Kelompok pemberontak baru muncul sebagai hasil dari pecahan CPB seperti Kachin, Shan dan Wa. Berawal dari dekatnya hubungan dengan CPB, China pun memiliki hubungan yang cukup dekat dengan ketiga etnis pecahan CPB tersebut, walau bukanlah suatu hubungan yang diakui secara resmi. Pemerintah China seringkali menolak keterkaitan negaranya dengan eksistensi kelompok pemberontak di Myanmar. Namun, kedekatan antara etnis –etnis di Myanmar dan China tersebut tetap terjadi tanpa disadari, walau bukan bersifat *government to government*.

Wilayah kekuasaan ketiga etnis tersebut yang berada di perbatasan China-Myanmar menjadi aspek penting, yang mana membuat masyarakat di China dengan mudah berinteraksi dengan etnis Myanmar di perbatasan. Etnis Wa merupakan etnis yang memiliki tingkat kedekatan cukup tinggi dengan masyarakat China, jika dibandingkan etnis-etnis pecahan CPB lainnya. Walau etnis Wa bukan salah satu etnis dari China, terdapat beberapa kelompok etnis Wa yang menjadi etnis minoritas di Yunan, dataran China (Lintner, *Who Are The Wa?*, 2017). Adanya persamaan etnis tersebut membuat China dan etnis Wa secara tersirat dekat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dll.

Kedekatan tersebut dapat dilihat dari pola kehidupan etnis Wa yang condong ke arah China. Di segi sosial dan budaya, masyarakat etnis Wa menggunakan bahasa mandarin sebagai media komunikasi utama, dan bahkan alat komunikasi seperti telepon dan internet menyambung jaringan dari China. Bahkan di bidang militer dan persenjataan, masyarakat China memberikan peran yang cukup besar. Berdirinya UWSA sebagai kekuatan etnis Wa di dalam bidang militer,

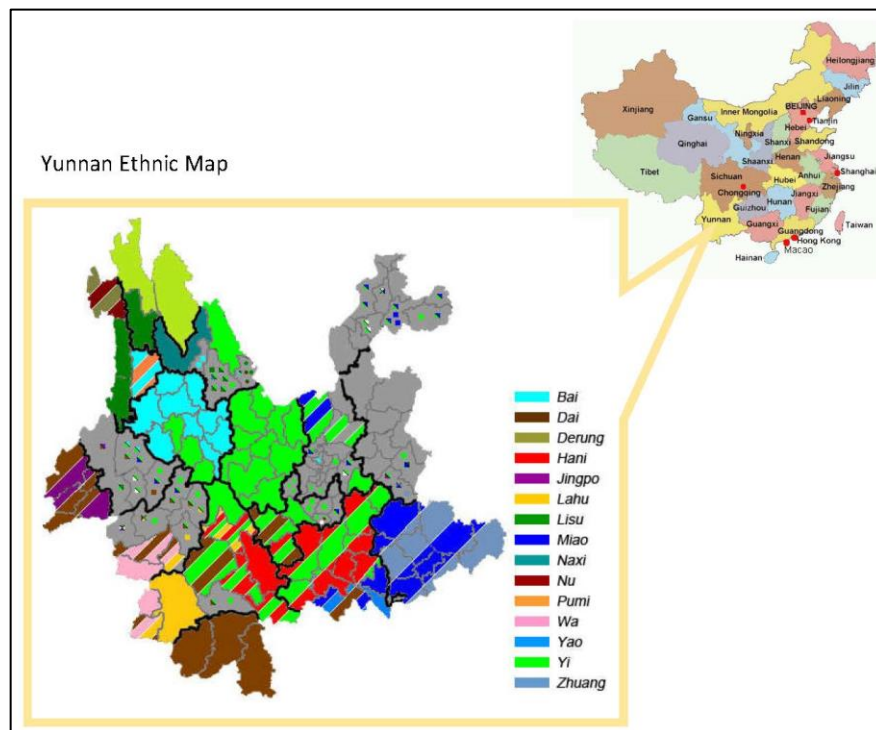
tidak dapat dipisahkan dari derasnya bantuan perusahaan-perusahaan China. Salah satu perusahaan tersebut adalah Liao Lian yang membantu UWSA untuk membangun fasilitas pusat radar dan misil di daerah kekuasaannya, Wing Gao. Berbagai bantuan militer lain pun diberikan sehingga kini UWSA merupakan etnis bersenjata yang lebih baik dan kuat jika dibanding dengan CPB di masa lalu. Namun, walau pengaruh China terdapat pada hampir semua aspek di kehidupan etnis Wa, hubungan yang mendominasi adalah ekonomi. Berkesinambungan dengan predikat China yang merupakan salah satu negara dengan tingkat perekonomian tertinggi di dunia, hubungan ekonomi yang menguntungkan lebih banyak dijalin oleh China dibandingkan hubungan lainnya.

### **C. Ketergantungan ekonomi UWSA dan China sebagai jalan menuju kedamaian di Myanmar**

China merupakan negara yang terkenal dengan pertumbuhan ekonomi luar biasa sejak 30 tahun terakhir (Tea, 2010). Menguasai banyak pasar di dunia, China menjalin hubungan ekonomi dengan banyak pihak termasuk etnis-etnis di Myanmar. Selama ini, terdapat 2 etnis besar di Myanmar yang menjalin hubungan ekonomi dengan China baik secara resmi maupun hanya bersifat transaksi transnasional. Kedua etnis tersebut merupakan etnis yang mendiami wilayah perbatasan China-Myanmar yakni Kachin dan Wa (UWSA). Kachin merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alamnya terutama giok, kayu, tenaga air dan mineral, sementara keadaan di UWSA berbanding terbalik karena berada di kawasan pegunungan yang jarang dijajah oleh manusia (Sun, 2017). Namun,

walau UWSA tidak memiliki kekayaan sumber daya alam sebanyak yang dimiliki oleh Kachin, hubungannya dengan China tetap terjalin dengan erat. Terdapat perbedaan kondisi antara kedua etnis tersebut selain di bidang sumber daya alam. Kachin, yang notabeneanya kaya, memiliki hubungan yang lebih condong ke arah barat, berbeda dengan UWSA yang condong ke China.

### C.1 Ketergantungan ekonomi China dan UWSA



Gb. 3.1 Ethnic Nationalism in Yunnan, China (Dui Hua, 2015)

Hubungan antara China dan UWSA memiliki corak yang beragam mulai dari segi sosial, historis dan lain-lain. Hubungan tersebut erat kaitannya dengan sejarah UWSA yang merupakan pecahan dari Communist Party of Burma (CPB) dan juga letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan China. Namun diantara semua hubungan tersebut, aspek ekonomi merupakan yang paling mencolok dan juga menimbulkan sebuah pandangan negatif dengan isu bantuan

China terhadap eksistensi kelompok pemberontak Myanmar. Namun pandangan tersebut tidak bisa dibenarkan maupun disalahkan. Tidak bisa dibenarkan karena pemerintah China tersendiri tidak mengakui adanya pembiayaan resmi dari pemerintah, tidak bisa disalahkan karena biaya yang mengalir baik resmi maupun tidak resmi dari China tersebut menjadi penyebab menguatnya UWSA hingga kini menjadi kekuatan militer etnis terbesar di Myanmar.

Hubungan ekonomi antara China dan UWSA mayoritas didominasi oleh transaksi transnasional (*people to people*). Terlihat pada peta diatas, bagaimana persebaran etnis Wa juga menempati kawasan provinsi Yunnan, China. Hal ini menjadi aspek penting karena persamaa etnis tersebut merupakan titik awal inisiasi hubungan antara UWSA dan China. Bersamaan dengan pola ekonomi liberal yang diadopsi China, masyarakat China berbondong-bondong mencari hubungan yang menguntungkan secara materi hingga ke negara-negara di sekitarnya. Hal ini memang cukup menyulitkan pemerintah China untuk mengetahui pergerakan uang, saham dan investasi dari maupun keluar China. Kesulitan pemerintah ini dibuktikan dengan adanya kasus mengenai salah satu perusahaan China yang menjalin hubungan kerjasama dan menimbulkan kontroversi cukup besar di bidang ekonomi adalah Yucheng Group. Perusahaan Yucheng merupakan perusahaan terkemuka di China yang menginovasi adanya platform perdagangan online, EzuBao. Kini Yucheng sedang menjalani investigasi atas tindakannya yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Yucheng diduga menjadi donatur atau investor utama atas pembiayaan biaya pemberontakan yang dilakukan oleh UWSA di Myanmar. Sebuah perjanjian perdagangan dibangun bersama dengan UWSA untuk

membangun sebuah Zona Perdagangan Bebas Asia Tenggara milik Yucheng dengan total investasi sebanyak 40 juta RMB (Sun, 2017). Tidak berhenti sampai situ, Yucheng juga menjadi pasar bagi penjualan senjata dan tentara untuk UWSA. Namun, dalam investigasinya pada tahun 2015, Yucheng berkilah bahwa pendanaannya untuk UWSA itu dilakukan sebagai salah satu realisasi OBOR China (Sun, 2017). Pemerintah China pun merespon pernyataan tersebut dengan negatif dan mengadakan penyelidikan lebih lanjut untuk aktivitas perusahaan tersebut.



Gb. 3.1 Map of Shan State with Key Areas of Influence and Trade Routes ( Mantraya, 2016)

Tidak berhenti pada satu perusahaan saja, masyarakat dengan kesamaan etnis di China pun turut membantu pendanaan bagi eksistensi UWSA. Pada awalnya, pendanaan UWSA bergantung pada kehadiran opium, narkotika yang cukup terkenal karena berada di kawasan Golden Triangle. Terlihat di peta, bagaimana jalur persebaran opium yang berupa amphetamin tersebar begitu luas. Garis merah merupakan jalur dari persebaran amphetamin yang terkonsentrasi pada

kawasan selatan teritori UWSA, sementara garis biru menunjukkan jalur perdagangan gelap senjata dari UWSA ke China (Mantraya, 2016). Hasil yang didapat dari jual beli opium pun tidak terhitung sedikit karena mencapai 16,3 juta USD (CNN, 2014) Namun pasca muncul kebijakan “opium free” dan mendapat desakan dari dunia internasional, UWSA kini beralih pada perusahaan senjata dan mineral alam seperti kayu.

UWSA memiliki pendanaan tersendiri dari perusahaan senjata Kunma dibantu oleh masyarakat-masyarakat China. Ahli Senjata dari China membimbing langsung UWSA untuk memproduksi senjata buatan China yang kemudian menjadikannya berhasil mendirikan gudang penjualan senjata di Manipur, India dan di perbatasan China-Myanmar (Keenan, 2016). Senjata buatan China yang diproduksi oleh UWSA tersebut memang bersifat ilegal, tetapi peminatnya cukup banyak karena berhasil di ekspor ke kawasan India dan Bangladesh (Keenan, 2016). Perusahaan-perusahaan yang didirikan UWSA dengan berkolaborasi dengan masyarakat China tersebut menjadi pendanaan utama untuk pemberontakan yang mereka lakukan. Perusahaan senjata Kunma tersebut menjadi tamparan hebat yang memalukan bagi China karena itu berdiri ilegal dan membawa nama negaranya. China meminta penutupan langsung dan kini tidak ada yang tertinggal dari eksistensi perusahaan tersebut kecuali tetap beredarnya senjata China buatan UWSA tersebut yang di selundupkan melalui Assam, Nagaland dan Manipur (Lintner dalam Keenan, 2016)

Secara resmi, China melakukan hubungan ekspor impor. Ekspor dari China berupa barang-barang rumah tangga yang banyak diminati masyarakat etnis Wa,

sementara impor dari UWSA berupa kayu. Bersamaan dengan meningkatnya hubungan ekspor-impor antara kedua negara tersebut, China pun membuka pintu dagang khusus yang berada di kawasan perbatasan dan dikuasai etnis bersangkutan (Transnational Institute, 2016). Adanya pembukaan pintu dagang khusus ini pun membuat China semakin mudah untuk menciptakan proyek ekonomis di kawasan Myanmar, dimana salah satunya adalah proyek pipa gas yang berada di kawasan UWSA, berbatasan langsung dengan salah satu provinsi di China yakni Yunnan.

## **C.2 Keterlibatan China dalam Perdamaian UWSA di Myanmar**

Dekatnya hubungan antara China dan UWSA ini menjadi gerbang baru yang secara tersirat memberikan peran bagi China untuk andil dalam permasalahan di Myanmar khususnya konflik etnis. Keterlibatan China ini dimulai dari hal kecil yakni adanya pengawasan langsung di kawasan etnis Wa. China dikabarkan memiliki mata dan telinga untuk setiap aktivitas dan kebijakan yang berada di kawasan tersebut (Slodkowski & Lee, 2016). Hal ini diperkuat dengan banyaknya warga negara China yang bekerja di kawasan Wa baik itu di bidang pemerintahan maupun bisnisnya. Tidak ada keterangan lebih lanjut dari pemerintah China terkait hal tersebut sehingga masyarakat umum hanya bisa menyebutkan keberadaan warga negara China tersebut sebagai bagian dari dekatnya hubungan China dan UWSA.

Bagi Myanmar atau bahkan dunia Internasional, China merupakan jalan keluar bagi pemiliknya permasalahan etnis ini karena pengaruh dan kedekatannya

dengan etnis bersenjata terbesar Myanmar, UWSA. UWSA sebagai etnis yang setara kekuataannya dengan UNFC (United Nationalities Federal Council) dianggap sebagai pimpinan dan panutan bagi etnis-etnis minoritas lainnya, sehingga menurut konsultan politik etnis bersenjata, walaupun suatu etnis tidak setuju akan pendapat UWSA, etnis tersebut tetap ingin UWSA berada di pihaknya (AFP, 2017). Kebesaran UWSA ini pun dapat dilihat dari dipilihnya UWSA sebagai ketua Federal Political Negotiation and Consultative Committee, sebuah forum untuk etnis-etnis yang menolak menandatangani NCA seperti KIA, National Democratic Alliance Army (NDAA), Shan State Progressive Party (SSPP) (Phyo & Mang, 2017).

Secara resmi, upaya China untuk memberikan pengaruh dan peran pada proses rekonsiliasi atau perdamaian di Myanmar ini sudah dituangkan pada kebijakannya yakni “*persuading for peace and facilitating dialogues*” (劝和促谈<sup>2</sup> dalam Sun, 2017), yang mana kebijakan serupa telah dikeluarkan jauh sebelum pemilihan umum di Myanmar pada tahun 2010. Kebijakan tersebut diikuti dengan penunjukan Wang Yingfan sebagai utusan khusus pertama untuk permasalahan Asia. Penunjukan utusan tersebut ditujukan sebagai jembatan dan jalan tengah, sebagai sarana untuk bernegosiasi dengan etnis-etnis partisipan dalam rekonsiliasi Myanmar. Melalui utusan-utusannya, China tidak berhenti berupaya mengajak etnis-etnis untuk bersikap positif menanggapi usulan rekonsiliasi pemerintah Myanmar. Bersamaan dengan perwakilan dari PBB, diskusi dan negosiasi baik

---

<sup>2</sup> “Li Keqiang Met with Myanmar State Counsellor Aung San Suu Kyi” [in Chinese], Ministry of Foreign Affairs, August 18, 2016, [www.fmprc.gov.cn/ce/cedk/chn/zgwj/t1390098.htm](http://www.fmprc.gov.cn/ce/cedk/chn/zgwj/t1390098.htm).



antar etnis maupun etnis dengan pemerintah terjadi dan difasilitasi. Bahkan China menawarkan 3 juta dollar untuk memfasilitasi negosiasi etnis terkait NCA yang pertama (Vrieze, 2017)

Tidak hanya melakukan bantuan melalui kontak langsung dengan etnis, China juga mencoba memberikan perannya pada pemerintah Myanmar (Tatmadaw) dengan membentuk organisasi perwakilan di sepanjang China-Myanmar bersama dengan etnis terkait dan pemerintah Myanmar sendiri (Keenan, 2016). Organisasi perwakilan tersebut dibentuk guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama konflik militer yang sering terjadi di perbatasan. Jauhnya letak perbatasan dengan pusat terkadang menciptakan keadaan yang lebih buruk. Oleh karena itu, konflik dapat terselesaikan dengan damai dan tenang dibantu oleh keberadaan organisasi tersebut.

Tanpa disadari, China telah mengambil peran yang cukup banyak dalam setiap proses rekonsiliasi yang diambil oleh Myanmar. Baik itu sebelum NCA dikeluarkan, bahkan hingga kini mencapai proses reformasi perjanjian Panglong yang merupakan tahap kedua NCA. Dalamnya peran China ini ditunjukkan oleh sikap UWSA yang senantiasa meminta China untuk menjadi saksi atau mediator bagi setiap negosiasi yang berlangsung antara etnis dan pemerintah Myanmar (Mang, Aung, & Dinmore, 2016). China pun bahkan menjadi harapan pertama UWSA ketika badan negosiasinya dalam NCA, *Federal Political Negotiation and Consultative Committee*, tidak mendapatkan hak untuk menyuarakan opininya di NCA karena telah menolak untuk menandatangani perjanjian sebelumnya. Penolakan ratifikasi tersebut mengeluarkan UWSA dan etnis-etnis lainnya sebagai

partisipasi NCA. Namun, berkat adanya bantuan dari China, anggota Federal Political Negotiation and Consultative Committee yang bukan merupakan etnis partisipan NCA diperbolehkan untuk menghadiri upacara pembukaan 21st-Century Panglong Conference<sup>3</sup>. Tidak hanya hadir dalam upacara pembukaan, etnis non partisipan tersebut pun berkesempatan untuk melakukan negosiasi politik dengan pemerintah Myanmar.

### **C.3 Keamanan Myanmar sebagai cermin dari hubungan China dan UWSA**

China telah mengambil banyak peran dalam setiap proses rekonsiliasi etnis di Myanmar. Berinteraksi langsung dengan etnis-etnis di Myanmar, bekerjasama dengan pemerintah Myanmar bahkan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi yang turut berada dalam proses rekonsiliasi tersebut, Persatuan Bangsa-Bangsa. Eratnya peran China dalam rekonsiliasi etnis ini membuat konsep Economy-Security Nexus menjadi alat analisa yang tepat untuk membuat garis besar hubungan. Konsep ini seperti dijelaskan sebelumnya menawarkan adanya opsi lain untuk sebuah dampak dari ketergantungan ekonomi suatu aktor.

Jika ketergantungan ekonomi ini terjadi antara China dan Myanmar, hubungan di aspek keamanan akan cenderung damai, sesuai dengan pandangan liberalisme. Namun hal yang menarik adalah, ketergantungan ekonomi ini terjadi antara *state dan non-state actor* yang mana keduanya memiliki perbedaan dalam

---

<sup>3</sup> 21st-Century Panglong Conference merupakan lanjutan dari upaya rekonsiliasi NCA, dimana salah satu tujuannya memperbaharui perjanjian Panglong inisiasi Jenderal Aung San yang dianggap berhasil di era kemerdekaan Myanmar

kewarganegaraan dan salah satu aktor mempunyai sejarah sebagai kelompok pemberontak bagi negara lain.

Ketergantungan ekonomi terjadi antara China dan etnis pemberontak United wa State Army yang merupakan bagian dari warga negara Myanmar. Walaupun UWSA berada dalam wilayah perbatasan Myanmar dan China, keberadaan hubungan ekonomi keduanya ini tetap menjadi hal yang menarik. Hubungan yang dekat antara China dan UWSA dibidang ekonomi cenderung erat dan membuktikan bahwa hal ini bisa menjadi jalan keluar bagi rekonsiliasi yang dilakukan oleh Myanmar. Kebijakan UWSA dalam menanggapi setiap proses rekonsiliasi yang ditawarkan Myanmar tidak dapat dilepaskan dari pengaruh China. Terlihat kedekatan ekonomi membuat hubungan keduanya semakin erat dibidang lainnya termasuk politik. UWSA menunjukkan kedekatannya dengan Chuna melalui sikap politik seperti, permintaan keturutsertaan China sebagai pihak tengah yang berperan aktif dalam rekonsiliasi Myanmar. China pun melakukan hal yang sama dengan mengeluarkan sikap-sikap politik seperti mengeluarkan kebijakan bersifat suportif, mengirimkan utusan khusus untuk membantu bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar, bahkan menawarkan bantuan dana khusus untuk penyelenggaraan diskusi terkait perdamaian di Myanmar.

Pemerintah Myanmar merespon hal tersebut dengan positif karena China mendukung terjadinya proses rekonsiliasi ini. Dekatnya hubungan antara China dan UWSA sebagai etnis pemberontak di Myanmar ini dinilai juga memberikan suatu keuntungan bagi Myanmar sebagai pihak di luar variabel. Keuntungan yang diperoleh oleh Myanmar tersebut tidak lain adalah bantuan dukungan di bidang

keamanan. Myanmar tentu membutuhkan UWSA sebagai salah satu pihak pendukung dalam agenda perdamaian konflik etnis, terlebih UWSA merupakan salah satu etnis bersenjata terbesar dan dijadikan panutan dari etnis-etnis minoritas dibawahnya.

Kehadiran UWSA apabila mendukung proses rekonsiliasi ini tentu akan menjadi kemenangan besar bagi Myanmar karena secara otomatis, etnis-etnis minoritas lain yang berada di bawah kekuasaan atau berada di dalam forum yang sama dengan UWSA akan turut meratifikasi perjanjian damai tersebut. Selama ini, Myanmar dan UWSA cenderung sulit untuk melakukan komunikasi karena sifat UWSA yang cenderung enggan untuk menandatangani perjanjian ulang karena perjanjian Panglong di tahun 1947 telah cukup untuk mengikat mereka menjadi *ceasefire groups*. Oleh karena itu, sangat diperlukannya peran China untuk membantu menciptakan kondisi yang mempercepat terjadinya proses rekonsiliasi ini. Kedekatan hubungan antara China dan UWSA dapat menjadi faktor penting masuknya peran China untuk merealisasikan rekonsiliasi di Myanmar. China dapat menjadi aktor pendorong UWSA untuk bersikap positif dalam merespon kebijakan Myanmar di perdamaian ini. China seperti disampaikan diatas, telah memberikan begitu banyak upaya untuk mendukung proses rekonsiliasi di Myanmar. Keberhasilan atau kegagalan yang China raih pasca upayanya mendukung proses rekonsiliasi, serta keadaan Myanmar selama berlangsungnya rekonsiliasi tersebut akan dijelaskan pada bab selanjutnya dengan metode analisa yang lain.